

BAB
V
Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari uraian penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut. Tata kelola Pemerintah Desa merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip good governance, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan penegakan hukum, harus diterapkan secara konsisten dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaan desa wisata. Keberhasilan pengelolaan desa wisata tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat, pelaku UMKM, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), sektor swasta, akademisi, serta pemerintah daerah melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Potensi Desa Puri sebagai destinasi wisata dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi lokal apabila dikelola melalui tata kelola yang profesional, berbasis potensi lokal, memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi kualitas lingkungan maupun nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas desa. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tata kelola pemerintahan desa sekaligus menjadi referensi praktis bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan pengelolaan desa wisata yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Terkait dengan saran peneliti membagi lima yaitu bagi pemerintah desa, masyarakat, pemerintah daerah, kelompok pengelola wisata, dan bagi penelitian selanjutnya. Bagi pemerintah desa, Pemerintah Desa Puri harus meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan mengenai tata kelola destinasi wisata, manajemen kelembagaan, pemasaran digital, dan pelayanan wisata serta menyusun regulasi desa yang mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan serta memperjelas pembagian tugas antar lembaga desa.

Bagi masyarakat Desa Puri, harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa wisata serta Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis potensi lokal sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Bagi pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memberikan pendampingan teknis, promosi, penguatan infrastruktur, serta dukungan anggaran untuk mempercepat pengembangan desa wisata selain itu, Memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung pembangunan desa wisata.

Bagi penelitian selanjutnya terdapat tiga poin. Poin pertama, Mengembangkan penelitian dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance*, *community-based tourism (CBT)*, *Pentahelix*, atau *Sustainable Tourism Governance* agar diperoleh model tata kelola yang lebih komprehensif. Point kedua, Melakukan penelitian komparatif pada beberapa desa wisata sehingga diperoleh model tata kelola terbaik (*best practice*) yang dapat direplikasi di daerah lain, dan yang terakhir

yaitu Mengkaji lebih mendalam dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari implementasi tata kelola desa wisata berkelanjutan dalam jangka panjang.